

**STAGNASI PEMBENTUKAN INSTITUSI KERJA SAMA TURKI-IRAK
DALAM PENGELOLAAN SUNGAI TIGRIS**

(Skripsi)

Oleh:

DINI ALFITRIYANI

NPM 2256071020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STAGNASI PEMBENTUKAN INSTITUSI KERJA SAMA TURKI-IRAK DALAM PENGELOLAAN SUNGAI TIGRIS

Oleh

DINI ALFITRIYANI

Sungai Tigris merupakan sumber daya air lintas batas yang memiliki peran strategis bagi Turki dan Irak. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya diplomasi dan kerja sama teknis, kedua negara hingga saat ini belum berhasil membentuk institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris seperti *Mekong River Commission* (MRC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan Turki–Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris serta mengidentifikasi faktor yang menghambat pembentukan institusi kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen pemerintah, dan berbagai sumber sekunder lainnya.

Penelitian ini menggunakan teori *relative gains* serta konsep *hydro-hegemony* untuk menganalisis pengaruh ketimpangan kekuasaan antara negara hulu dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya institusi kerja sama formal antara Turki dan Irak dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan nasional, terutama kepentingan Turki dalam mempertahankan kontrol terhadap Sungai Tigris untuk mendukung sektor energi, pertanian, dan posisi geopolitik negara. Posisi Turki sebagai negara hulu memberikan keuntungan strategis yang membuat kerja sama yang bersifat mengikat dianggap kurang menguntungkan dibandingkan mempertahankan pengelolaan unilateral. Dengan demikian, kegagalan pembentukan institusi kerja sama bukan disebabkan oleh ketiadaan komunikasi antarnegara, melainkan oleh perbedaan kalkulasi kepentingan dan ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan Sungai Tigris.

Kata Kunci: Sungai Tigris, Turki–Irak, institusi kerja sama, *relative gains*, *hydro-hegemony*.

ABSTRACT

STALL IN THE ESTABLISHMENT OF A TURKISH-IRAQI COOPERATIVE INSTITUTION FOR THE MANAGEMENT OF THE TIGRIS RIVER

By

DINI ALFITRIYANI

The Tigris River is a transboundary water resource that plays a strategic role for Turkey and Iraq. However, despite various diplomatic efforts and technical cooperation, the two countries have not yet succeeded in establishing a formal cooperative institution for the management of the Tigris River, such as the Mekong River Commission (MRC). This study aims to analyze the dynamics of Turkey–Iraq relations regarding the management of the Tigris River and to identify the factors hindering the formation of such a cooperative institution. This study employs a qualitative method with data collection techniques consisting of a document review sourced from scientific journals, reports from international organizations, government documents, and various other secondary sources.

This study employs the theory of relative gains and hydro-hegemony to analyze the impact of power imbalances between upstream and downstream countries in water resource management. The results indicate that the failure to establish a formal cooperative institution between Turkey and Iraq is influenced by divergent national interests, particularly Turkey’s interest in maintaining control over the Tigris River to support its energy sector, agriculture, and geopolitical position. Turkey’s position as an upstream country provides strategic advantages that make binding cooperation seem less advantageous than maintaining unilateral management. Thus, the failure to establish cooperative institutions is not caused by a lack of communication between the two countries, but rather by differing calculations of interests and power imbalances in the management of the Tigris River.

Keywords: The Tigris River, Turkey–Iraq, cooperative institutions, relative gains, hydro-hegemony.

**STAGNASI PEMBENTUKAN INSTITUSI KERJA SAMA TURKI-IRAK
DALAM PENGELOLAAN SUNGAI TIGRIS**

Oleh

DINI ALFITRIYANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : STAGNASI PEMBENTUKAN INSTITUSI
KERJA SAMA TURKI-IRAK DALAM
PENGELOLAAN SUNGAI TIGRIS

Nama Mahasiswa : Dini Alfutriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2256071020

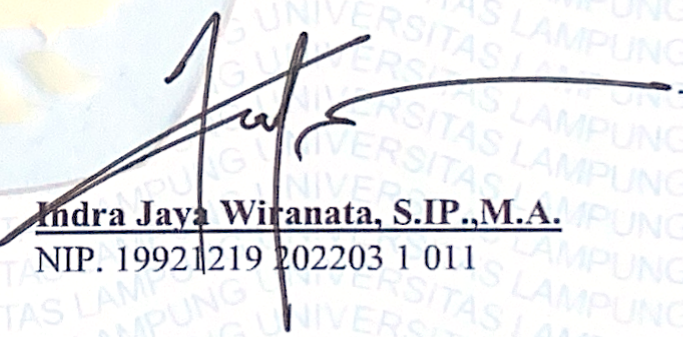
Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

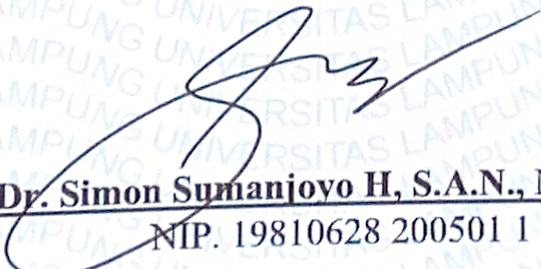
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19900606 201903 1 019


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

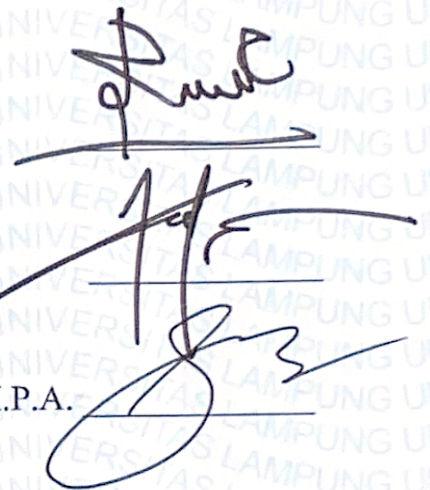
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Dini Alfutriyani

NPM. 2256071020

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Tulang Wojo tanggal 07 Juni 2002, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Agus Miroso dan Ibu Sriyaningsih. Penulis memulai pendidikan formal di TK Pertiwi, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Negeri Batu Badak, SMP Negeri 2 Marga Sekampung dan SMK Negeri 1 Marga Sekampung. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN BARAT. Selama perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan akademik. Selain aktivitas akademik, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan non akademik lainnya. Penulis juga terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis menjadi anggota di divisi *External Realtion and Business Departement* di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional dan pernah menjadi panitia pada acara Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) *chamber Liaoson Officer* pada tahun 2024. Penulis juga berperan sebagai panitia pada acara *International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies* (IICIS) dan juga menjadi panitia Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII).

MOTTO

“And I surrender my affairs to Allah”

(Q.S Al-Ghafir : 44)

“Sebutlah namaNya, tetap di jalanNya, kelak kau mengingat, kau akan teringat,
terus berenang, lanjutlah mendaki”

(33x-Perunggu)

*“Everything you are feeling right now is part of the process of growth, keep your
spirits up”*

(Na Hee Do_2521)

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak Agus, Ibu Sri, Mas Arif, Mba Retno
dan Ponakan tersayang Arsenio.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahman, ridha dan karunia-Nya, skripsi dengan judul “Stagnasi Pembentukan Institusi Kerja Sama Turki-Irak Dalam Pengelolaan Sungai Tigris” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung serta selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, motivasi dan wawasan baru mengenai penelitian skripsi ini. Masukan dan dorongan yang diberikan telah mendorong penulis untuk memperbaiki kualitas penelitian, memperluas perspektif, serta meningkatkan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
3. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
4. Bang Roby Rakhmasi S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang senantiasa memberikan ilmu, waktu, bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis agar penulis semangat dalam penulisan skripsi. Terima kasih banyak atas segala dedikasinya selama ini.
5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan masukan, waktu, ilmu selama masa perkuliahan hingga proses penulisan

skripsi, khususnya dalam pengembangan keterampilan penulisan yang menjadi bekal berharga bagi penulis di masa depan;

6. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, bantuan dan kesempatan bagi penulis untuk terus berkembang sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Agus dan Ibu Sri, terima kasih telah memberikan segalanya kepada penulis, mendidik penulis dengan sepenuh hati, membekali dengan segala hal baik, selalu mengajarkan berbagai ilmu, seperti kejujuran dan rendah hati dalam setiap proses hidup penulis, selalu mengingatkan untuk selalu ingat kepada Allah, selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih telah mendidik dan mengantarkan saya sampai pada titik ini. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi sandaran, penyemangat penulis dan juga mendengarkan keluh kesah serta menghibur penulis. Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang saya panjatkan kepada Allah untuk kalian.
8. Kakak-kakak penulis tersayang, Mas Arif dan Mbak Retno, serta ponakan kesayangan mami, Arsenio. Terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap proses, baik dalam suka maupun duka, serta tidak pernah lelah memberikan semangat ketika penulis merasa lelah dan kehilangan motivasi. Bantuan moral maupun materi, pengertian, serta kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan yang berlimpah
9. Kakek Nenek penulis Mbah Sarbini dan Mbah Suratmi, Terima kasih untuk semua do'a dan dukungannya selama ini, sehingga penulis bisa berada di titik

ini. Terima kasih sudah selalu mengajarkan penulis untuk hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur dan hiduplah lama lagi, harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

10. Sahabat penulis, Rehana Saskia, terima kasih sudah tulus menemani penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah baik suka maupun duka dan peduli kepada penulis. Terima kasih karena sudah menjadi penguat penulis, selalu hadir di saat-saat bahagia serta sedih penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan sudah seperti saudara. Hadirnya Rehana Saskia di kehidupan penulis merupakan anugrah dari Allah SWT.
11. Sahabat penulis, Audy Mayra Aulia, Sahabat sejak awal perkuliahan dan partner jalan-jalan berburu jajanan kaki lima. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis di situasi tersulit sekalipun. Terima kasih telah membersamai penulis dari suka hingga duka. Penulis bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, ceria, dan setia seperti Audy.
12. Rafidah Aziz dan Shefiyna Meilita Permata Arisna, Sahabat penulis yang telah membersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis bersandar.
13. *Inner Circle* penulis di penghujung perkuliahan, “PS” Salma Humaimah Azizah, Suci Dea Adillah, Tasya Alvira Rizka Cik han, Mutiara Ramadhian Intani, Terima kasih telah menjadi bagian hidup penulis. Suka, duka, canda dan tawa kita lalui bersama. Terima kasih sudah menjadi *safe place* penulis, kebersamaan bersama kalian sangat berarti bagi penulis. Bersama kalian hari-hari dikampus berbubuh menjadi ceria dan layak dikenang.

14. Salma Humaimah Azizah yang tak disangka-sangka menjadi sahabat penulis di penghujung perkuliahan. Terima kasih sudah kebersamai penulis di masa-masa akhir perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah dan memberikan support kepada penulis dan terima kasih telah mengisi hari-hari penulis.
15. Dela Nabila, Destin Afitri, Cindy Apriani, Yuan Agasy dan Isika Putri sahabat penulis sejak SMK. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Terima kasih sudah hadir di kehidupan penulis. Dukungan, perhatian dan kebersamaan yang telah terjalin sejak lama menjadi sesuatu yang berharga. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan semakin kuat seiring berjalannya waktu.
16. Maharani Jasmine, sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis. Terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Terima kasih atas waktu dan pengalaman yang berharga. Terima kasih telah memperkenalkan arti bahagia di masa perkuliahan.
17. Zefanya Puan Natama Pangaribuan, M. Fiqri Qurahman, Ahmad Alim Hudzalifah teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan. Terima kasih telah kebersamai penulis, dukungan yang kalian berikan kepada penulis sangat berkesan.
18. Abbad Ziaul, Zulkarnaen. Bayu Febi Dwi Putra, Ikhlas Pandu, teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan. Terima kasih telah hadir sebagai teman yang baik dan membuka gerbang pertemanan bagi penulis.
19. Putu Rahmayani, Mba Aja dan Debby, Teman kost penulis yang senantiasa menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah bagi penulis, teman jalan-jalan ketika penulis penat, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis.

20. Mba Mayu, Mentor Magang penulis yang sangat baik dan merangkul penulis. Terima kasih telah memberikan ilmu, nasehat, arahan dan dukungan kepada penulis. Penulis bersyukur bisa bertemu dan mengenal Mba mayu.
21. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman HI 22 yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan, serta keluarga besar HMJ HI periode 2023/2024, khususnya Divisi ERBD, atas pengalaman berorganisasi, kebersamaan, dan pembelajaran yang berharga. Ucapan Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan KKN Desa Banyumas, terima kasih atas kerja sama, kenangan, dan solidaritas selama masa pengabdian.
22. Park Chanyeol, Idola penulis sejak 2016 hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis untuk semangat menjalani hari-hari sekaligus sumber kebahagiaan penulis selama pembuatan skripsi ini, dan EXO (sehun, Kai, Suho. D.O, Chen, Lay, Baekhyun, Xiumin, Luhan, Tao dan Kris Wu yang telah menjadi motivasi penulis hingga terus berusaha dan tidak menyerah ditengah jalan.
23. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Dini Alfitriyani yang telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang mencoba ikhlas di setiap hari nya, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi, terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Terima kasih karena sudah bertahan dan menyelesaikan yang sudah dimulai. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

MOTTO	xiii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Landasan Teori dan Konsep	25
2.2.1 Teori <i>Relative Gains</i>	25
2.2.2 Konsep <i>Hydro-Hegemony</i>	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 38
4.1 Dinamika Hubungan Turki – Irak dalam Pengelolaan Sungai Tigris	38
4.1.1 Peran Sungai Tigris bagi Turki dan Irak	41
4.1.2 Kepentingan Irak dalam Upaya Kerja Sama Pengelolaan Sungai Tigris.....	47
4.1.3 Ketergantungan Irak terhadap Sungai Tigris	50
4.1.4 Krisis Air dan Ancaman Lingkungan di Irak.....	53
4.2 Kepentingan Nasional Turki dalam Penguasaan Sungai Tigris	57
4.2.1 Kepentingan Energi dan Ketahanan Energi Sosial	60

4.2.2 Kepentingan Pertanian dan Pembangunan Wilayah	63
4.2.3 Penolakan Turki terhadap <i>Water Sharing Agreement</i>	67
4.3 <i>Power Asymmetry</i> dan Kegagalan Kerja Sama Turki-Irak	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	20
2. Sungai Lintas Batas dan Institusi Kerjasama nya.....	39
3. Ketergantungan Irak terhadap Sungai Tigris.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Llisu Dam on The Tigris River.....	11
2. Hasil pengolahan Data VOSviewer (Density).....	24
3. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32
4. Peta lokasi TRB.....	42
5. Kondisi Tekanan Air Dasar di Cekungan Euftar-Tigris.....	48

DAFTAR SINGKATAN

FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GAP	: <i>Güneydoğu Anadolu Projesi</i>
ICPDR	: <i>International Commission for the Protection of the Danube River</i>
MCR	: <i>Mekong River Commission</i>
NBI	: <i>Nile Basin Initiative</i>
SIWI	: <i>Stockholm International Water Institute</i>
TRB	: <i>Tigris River Basin</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sungai Tigris dan Eufrat adalah sungai lintas batas di Timur Tengah yang mengalir melintasi beberapa negara di sepanjang tepiannya, terutama Turki, dan Irak. (Lloyd et al., 2026). Kedua sungai tersebut bermuara di wilayah pegunungan di bagian timur Turki, kemudian mengalir melalui Suriah dan Irak sebelum bermuara di Teluk Persia. Posisi Turki sebagai negara hulu memberinya kendali yang lebih besar atas aliran air dibandingkan dengan negara-negara hilir. Data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjukkan bahwa Turki menyumbang sekitar 51% dari aliran Sungai Tigris, sementara Irak menyumbang sekitar 39% dan Iran sekitar 10%. Ketidakseimbangan geografis dan hidrologis ini semakin diperparah oleh pengembangan infrastruktur air secara sepihak oleh Turki melalui proyek-proyek berskala besar seperti Proyek Anatolia Tenggara (GAP), yang melibatkan pembangunan puluhan bendungan dan proyek irigasi untuk memenuhi kebutuhan energi dan pertanian domestik. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara hilir karena berpotensi mengurangi ketersediaan air mereka dan memicu ketegangan dalam hubungan antarnegara. Meskipun telah ada beberapa upaya kerja sama, seperti pembentukan komite teknis bersama pada tahun 1983 antara Turki dan Irak untuk membahas pengelolaan air di daerah aliran sungai, mekanisme ini belum berkembang menjadi lembaga permanen dan belum menghasilkan kemajuan yang signifikan (Fao, 2009) .

Pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai Tigris-Eufrat menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi di antara negara-negara di sepanjang sungai tersebut, terutama Turki dan Irak, karena air dari sistem sungai ini mengalir melintasi perbatasan nasional dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sebuah laporan dari *Stockholm International Water Institute* (SIWI) menunjukkan bahwa sistem

sungai ini memiliki potensi signifikan untuk memberikan manfaat ekonomi jika dikelola secara terkoordinasi di tingkat regional, misalnya melalui peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian dan alokasi air yang lebih terintegrasi di seluruh sub-daerah aliran sungai. Namun, terlepas dari potensi manfaat bersama dari kerja sama lintas batas, pengelolaan air di wilayah ini tetap terfragmentasi dan didominasi oleh kebijakan nasional masing-masing negara. Negara-negara di sepanjang sungai merupakan bagian dari sistem hidrologi yang saling terhubung, di mana kebijakan pengelolaan air di satu negara berdampak langsung pada kebijakan di negara-negara hilir. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan mekanisme koordinasi regional yang lebih kuat untuk pengelolaan sungai lintas batas, hingga saat ini kerja sama yang ada masih terbatas pada forum teknis, pertukaran data, atau proyek bersama sementara, dan belum berkembang menjadi lembaga formal permanen (Jägerskog, 2012).

Pemilihan Sungai Tigris sebagai fokus penelitian juga didasarkan pada karakteristiknya sebagai sungai lintas batas yang memiliki tingkat saling ketergantungan yang tinggi antarnegara, tetapi belum didukung oleh institusi kerja sama formal. Berbeda dengan beberapa sungai internasional lain yang telah memiliki mekanisme kelembagaan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air, pengelolaan Sungai Tigris masih didominasi oleh kebijakan nasional masing-masing negara. Kondisi ini menjadikan Sungai Tigris sebagai kasus yang menarik untuk mengkaji bagaimana perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan posisi antara negara hulu dan hilir, serta dinamika politik kawasan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembentukan institusi kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas isu sumber daya air, tetapi juga menjelaskan bagaimana hubungan politik antarnegara membentuk tata kelola sungai lintas batas.

Pengelolaan sungai lintas batas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi air, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor politik, kepentingan nasional, dan dinamika hubungan antarnegara. Setiap negara dalam suatu sistem sungai memiliki kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya air seperti untuk irigasi, energi, atau

pembangunan ekonomi sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung berorientasi pada kepentingan domestik masing-masing. Situasi ini sering kali membuat negara-negara menerapkan kebijakan pengelolaan air secara sepihak tanpa koordinasi yang kuat dengan negara lain. Ketidakseimbangan kekuatan di antara negara-negara yang terlibat terutama antara negara hulu dan hilir semakin membentuk pola interaksi dalam pengelolaan sungai lintas batas. Negara-negara yang berada dalam posisi lebih dominan cenderung memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya air, sehingga mereka memiliki sedikit insentif untuk membangun kerja sama formal (Montazeri et al., 2023). Negara-negara yang lebih bergantung menghadapi keterbatasan dalam mendorong pembentukan lembaga kerja sama. Ketidadaan lembaga kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas batas dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kepentingan nasional, kebijakan politik, dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di antara negara-negara.

Pembentukan lembaga intitusi kerja sama formal sering dipandang sebagai sarana untuk mengelola ketergantungan bersama terhadap sumber daya air lintas batas melalui koordinasi kebijakan, pertukaran data hidrologi, dan penyediaan forum negosiasi antar negara. Contoh yang sering dikutip adalah pengelolaan Sungai Mekong melalui pembentukan *Mekong River Commision* (MRC) pada tahun 1995, yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi bagi negara-negara yang berbatasan dengan sungai tersebut untuk secara kolektif mengatur penggunaan sumber daya air (Wolf et al., 1999). Situasi yang berbeda dapat diamati dalam pengelolaan Sungai Tigris, yang melibatkan Turki sebagai negara hulu dan Irak serta Suriah sebagai negara hilir. Ketiga negara ini sangat bergantung pada aliran sungai tersebut, hingga saat ini belum ada badan kerja sama regional formal.

Kegagalan kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris antara Turki dan Irak harus dipahami sebagai hasil dari dinamika politik yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan hulu-hilir, bukan sekadar kegagalan kerja sama. Turki, sebagai negara hulu, memegang posisi strategis dalam mengendalikan aliran air melalui pembangunan bendungan dan kebijakan pengelolaan air nasional, yang memberinya kapasitas untuk menentukan distribusi

air lintas batas sesuai dengan kepentingan domestiknya. Situasi ini menciptakan hubungan ketergantungan bagi Irak sebagai negara hilir, yang sangat bergantung pada stabilitas aliran air dari wilayah Turki untuk kebutuhan pertanian dan domestik, sehingga membatasi daya tawarnya dalam mengadvokasi pembentukan lembaga-lembaga kerja sama (D. A. Kibaroglu, 2020).

Dalam pengelolaan sungai lintas batas, keberadaan forum atau lembaga intitusi kerja sama sangatlah penting karena sungai yang mengalir melintasi lebih dari satu negara menciptakan hubungan yang sangat saling bergantung, yang berarti bahwa kebijakan suatu negara dapat secara langsung memengaruhi negara lain. Tanpa mekanisme koordinasi, tindakan sepihak seperti pembangunan bendungan atau pengalihan aliran air berpotensi memicu konflik, terutama antara negara hulu dan hilir (Wolf et al., 2002). Institusi kerja sama diperlukan sebagai wadah untuk mengatur distribusi air, menyepakati aturan bersama, dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antar negara. Tata kelola sungai internasional menunjukkan bahwa keberadaan lembaga formal dapat membantu mengurangi risiko konflik dan meningkatkan stabilitas hubungan antar negara melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur.

Kegagalan pembentukan intitusi kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris juga sangat terkait dengan perbedaan kepentingan nasional Turki dan Irak terkait pemanfaatan sumber daya air. Bagi Turki, air dipandang tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan politik nasional, terutama melalui proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan produksi energi dan hasil pertanian di wilayah Anatolia Tenggara. Sebaliknya, Irak memandang air lebih sebagai kebutuhan vital untuk menopang sektor pertaniannya dan stabilitas sosial dalam negeri, yang mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap aliran air dari wilayah hulu. Perbedaan prioritas ini menyulitkan tercapainya kesepakatan mengenai pengelolaan bersama, karena masing-masing negara memiliki prioritas yang berbeda terkait pemanfaatan sumber daya ini (Albert et al., 1998). Rendahnya tingkat kepercayaan antara kedua negara juga merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya lembaga yang

mengatur Sungai Tigris. Hubungan politik antara Turki dan Irak dalam beberapa dekade terakhir ditandai oleh ketegangan keamanan, konflik regional, dan perbedaan kepentingan strategis, yang semuanya telah mempersulit upaya kerja sama terkait sumber daya air. Dalam konteks ini, lembaga kerja sama memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi agar dapat berfungsi secara efektif, sementara hubungan politik yang tidak stabil justru mendorong negara-negara untuk lebih mengandalkan kebijakan unilateral daripada komitmen kolektif.

Kerja sama internasional tidak selalu dipandang sebagai pilihan yang menguntungkan bagi semua negara, karena pertimbangan utamanya bukanlah sekadar manfaat absolut, melainkan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan secara relatif di antara negara-negara. Dalam konteks pengelolaan Sungai Tigris, tidak adanya lembaga kerja sama formal tidak selalu merupakan kondisi yang merugikan; sebaliknya, hal ini dapat berfungsi sebagai strategi yang justru menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang berada dalam posisi dominan (Elman & Jensen, 2014). Sebagai negara hulu, Turki memiliki kendali langsung atas aliran air melalui kapasitas infrastruktur dan kebijakan domestiknya; dengan demikian, tanpa adanya lembaga kerja sama, negara tersebut masih dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kepentingan nasionalnya tanpa terikat oleh aturan distribusi yang membatasi. Sebaliknya, pembentukan lembaga kerja sama berpotensi mengharuskan distribusi sumber daya yang lebih seimbang, yang, dari teori Relative Gains dapat dianggap merugikan bagi negara dominan karena mengurangi keunggulan strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam situasi di mana kerja sama mengakibatkan distribusi manfaat yang tidak seimbang atau berpotensi meningkatkan posisi relatif pihak lain, suatu negara cenderung memilih untuk tidak bekerja sama. Dengan demikian, ketegagalan kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris dapat dipahami sebagai pilihan rasional yang lebih menguntungkan bagi Turki sebagai negara hulu, yang tidak diatur secara institusional.

Pengelolaan sungai lintas batas umumnya memerlukan pembentukan lembaga kerja sama formal untuk mengatur alokasi sumber daya, mendukung koordinasi,

dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antarnegara, sebagaimana dibahas dalam berbagai studi tentang pengelolaan sumber daya air lintas batas yang menyoroti pentingnya lembaga-lembaga tersebut dalam mendorong stabilitas dan kerja sama yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan Sungai Tigris, yang melibatkan Turki, Irak, dan Suriah, saat ini tidak ada lembaga kerja sama formal yang dibentuk untuk mengatur penggunaan dan distribusi air secara bersama-sama, yang mengakibatkan hubungan di antara negara-negara ini sering kali bersifat unilateral dan didorong oleh kepentingan nasional masing-masing (A. Kibaroglu & Scheumann, 2013). Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara tuntutan akan kerja sama kelembagaan dan realitas interaksi politik antarnegara yang belum mampu mendorong pembentukan badan bersama, di mana faktor-faktor seperti konflik kepentingan, kurangnya kepercayaan, dan kekhawatiran mengenai pembagian manfaat tetap menjadi hambatan utama dalam membangun kerja sama formal, meskipun kebutuhan akan hal tersebut semakin mendesak.

Sungai Mekong dapat dikatakan memiliki dampak global yang lebih luas daripada Sungai Tigris, terutama karena kaitannya dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa negara di Asia Tenggara dan menopang mata pencaharian sekitar 70 juta orang yang bergantung padanya untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Selain itu, Delta Mekong di Vietnam merupakan salah satu kawasan penghasil beras terbesar di dunia, artinya gangguan pada aliran sungai atau ekosistemnya dapat berdampak pada pasar pangan global. Sungai Mekong juga dikenal sebagai salah satu sungai air tawar dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dalam hal kerja sama internasional, pengelolaan sungai ini juga terkenal berkat Komisi Sungai Mekong, yang sering disebut sebagai contoh bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi dalam mengelola sungai lintas batas. Sungai Mekong dapat dikatakan memiliki dampak global yang lebih luas daripada Sungai Tigris, terutama karena kaitannya dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa negara di Asia Tenggara dan menopang mata pencaharian sekitar 70 juta orang yang bergantung padanya untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Selain itu, Delta Mekong di Vietnam merupakan salah satu kawasan penghasil beras terbesar di

dunia, artinya gangguan pada aliran sungai atau ekosistemnya dapat berdampak pada pasar pangan global. Dalam hal kerja sama internasional, pengelolaan sungai ini juga cukup terkenal berkat Komisi Sungai Mekong, yang sering disebut sebagai contoh bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi dalam mengelola sungai lintas negara (Dore & Lebel, 2010).

Pengelolaan Sungai Mekong sering kali menjadi contoh konkret kerja sama kelembagaan di antara negara-negara yang berada di sepanjang sungai tersebut. Dengan didirikannya MRC pada tahun 1995, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam menyepakati kerangka kerja sama formal yang mencakup pengelolaan air, pembangunan bendungan, dan pertukaran data hidrologi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, MRC terus berfungsi sebagai forum permanen yang menyediakan mekanisme konsultasi dan prosedur pemberitahuan untuk proyek-proyek lintas batas. Sungai Mekong menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan MRC tidak dapat dipisahkan dari kesadaran kolektif akan pentingnya stabilitas regional dan kebutuhan akan koordinasi jangka panjang di tengah pembangunan infrastruktur air yang masif. MRC menyediakan ruang untuk dialog rutin dan prosedur formal yang dapat meredakan potensi ketegangan antar negara, meskipun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perbedaan kepentingan yang ada (Dore & Lebel, 2010).

Sungai Nil melalui *Nile Basin Initiative* (NBI), yang didirikan pada tahun 1999 sebagai forum kerja sama antar negara di kawasan tersebut. NBI berfungsi sebagai wadah untuk mendorong dialog, meningkatkan transparansi, dan mempromosikan kerja sama teknis dalam pengelolaan air. Meskipun belum menjadi lembaga yang sepenuhnya mengikat, keberadaan NBI menunjukkan upaya kolektif negara-negara di sepanjang sungai tersebut untuk mengelola sumber daya air secara bersama-sama dan menghindari konflik terbuka (Wolf et al., 2002). Adanya forum kerja sama untuk pengelolaan sungai lintas batas memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi negara-negara yang berisiko mengalami konflik. Salah satu manfaat utamanya adalah terciptanya platform komunikasi dan dialog yang memungkinkan negara-negara untuk bertukar informasi dan membangun kepercayaan. Dalam

kasus NBI, forum ini berperan dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat koordinasi di antara negara- negara di sepanjang sungai, sehingga mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Melalui mekanisme ini, negara- negara dapat secara terbuka mendiskusikan kepentingan masing-masing dan mencari solusi bersama untuk pengelolaan sumber daya air NBI.

Kerja sama yang lebih terinstitusionalisasi dapat ditemukan di sepanjang Sungai Danube melalui *International Commission for the Protection of the Danube River* (ICPDR), yang didirikan berdasarkan Konvensi Danube tahun 1994. Forum- forum kerja sama juga memberikan manfaat berupa pengelolaan sumber daya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas dalam kerja sama di Sungai Danube melalui ICPDR, yang memungkinkan negara- negara anggota untuk menyusun kebijakan bersama mengenai kualitas udara, pengendalian polusi, dan perlindungan ekosistem. Melalui lembaga ini, pengelolaan sungai tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pendekatan kolektif yang mempertimbangkan kepentingan semua negara yang terlibat dalam ICPDR. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi negara-negara Eropa untuk bekerja sama dalam pengelolaan kualitas air, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Keberadaan ICPDR menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas dapat efektif jika didukung oleh komitmen bersama dan aturan yang mengikat (Bachmann & Csagoly, 2006).

Kerja sama terkait Sungai Indus difasilitasi melalui *Indus Water Commision*, yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960 antara India dan Pakistan. Perjanjian ini secara jelas mengatur alokasi dan pemanfaatan air antara kedua negara serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif stabil, bahkan di tengah hubungan politik yang seringkali tegang. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama formal tetap dapat terwujud meskipun terdapat konflik politik yang intens. Perjanjian ini merupakan salah satu contoh paling abadi dari kerja sama pengelolaan sungai lintas batas, yang tetap berlaku meskipun terjadi konflik politik dan bahkan perang antara kedua negara. Mekanisme ini secara jelas mengatur distribusi air antara kedua negara dan menyediakan sistem penyelesaian

sengketa yang terstruktur (Rossi, 2019). Manfaat lainnya adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, yang sangat penting bagi negara-negara yang memiliki hubungan politik yang tegang. Dalam kasus Komisi Perairan Indus, yang dibentuk melalui Perjanjian Perairan Indus, forum ini menyediakan prosedur yang jelas untuk menangani sengketa pembagian air antara India dan Pakistan. Sering terjadi konflik antara kedua negara, mekanisme ini tetap berfungsi sebagai saluran komunikasi resmi yang mampu mencegah eskalasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga kerja sama dapat berperan sebagai faktor penstabil dalam hubungan bilateral yang rentan konflik.

Kerja sama tidak selalu menjadi kebutuhan mendesak, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuatan yang signifikan di antara negara-negara yang terlibat. Dalam kasus Sungai Tigris, dominasi Turki sebagai negara hulu yang mengendalikan sumber daya air melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan nasional memungkinkan negara tersebut mengelola sumber daya air secara sepihak tanpa bergantung pada mekanisme kelembagaan bersama. Dalam kondisi seperti itu, kerja sama justru dapat dipandang merugikan bagi negara yang dominan, karena berisiko membatasi fleksibilitas kebijakan dan mengurangi keunggulan strategisnya. Irak bergantung sebagai negara hilir, situasi ini tidak cukup untuk memaksa pembentukan lembaga kerja sama formal karena kurangnya keseimbangan kekuatan dan insentif yang memadai bagi pihak dominan untuk berkomitmen pada kerja sama jangka panjang (Zeitoun & Warner, 2006). Tidak adanya lembaga kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris tidak selalu menunjukkan adanya urgensi yang tinggi untuk membangun kerja sama formal, sebaliknya, hal ini mungkin mencerminkan situasi di mana pengelolaan sepihak oleh negara yang dominan masih dianggap lebih menguntungkan dari perspektif politik dan distribusi kekuasaan.

Wilayah hilir menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Turki, melalui proyek bendungan berskala besar seperti Bendungan Ilisu dalam rangka Program GAP, semakin memperkuat kendalinya atas aliran air di hilir. Sejumlah studi menunjukkan bahwa posisi geografis Turki memberikan pengaruh politik yang

signifikan dalam negosiasi air dengan Irak dan Suriah. Beberapa perjanjian bilateral telah ditandatangani di masa lalu, belum ada lembaga regional formal yang setara dengan MRC yang dibentuk. Interaksi antar negara di daerah aliran sungai terutama terjadi melalui negosiasi situasional dan protokol sementara, bukan melalui lembaga permanen yang mengikat secara hukum (A. Kibaroglu & Scheumann, 2013). Tidak adanya lembaga formal di sepanjang Sungai Tigris mencerminkan ketidakseimbangan antara negara-negara di hulu dan hilir. Negara-negara yang menguasai wilayah dan infrastruktur cenderung memiliki daya tawar yang lebih besar, sehingga mereka tidak selalu termotivasi untuk menetapkan aturan yang mungkin membatasi kebijakan nasional mereka sendiri. Selain itu, ketegangan politik di kawasan tersebut serta dinamika konflik di Timur Tengah juga mempersulit proses pembentukan kerja sama. Hubungan bilateral yang tidak konsisten, serta pergantian rezim dan konflik internal di Irak dan Suriah, menjadi hambatan dalam menciptakan mekanisme multilateral yang permanen (A. Kibaroglu, 2019)

Turki yang berada di hulu sungai memperoleh keuntungan dengan mendapatkan lebih banyak air dibandingkan Suriah dan Irak. Turki meluncurkan proyek GAP atau Proyek Anatolia Tenggara, yang merupakan proyek hidrologi dengan 22 bendungan dan 19 pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Sungai Tigris dan Efrat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan keadaan sosial, terutama bagi masyarakat di Anatolia Tenggara yang dianggap memiliki ketertinggalan dalam pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain di Turki. Diharapkan proyek GAP dapat memenuhi kebutuhan irigasi untuk sektor pertanian dan menyediakan alternatif energi untuk mendukung industrialisasi di Turki. Dengan adanya proyek GAP, diperkirakan 80% dari aliran Sungai Efrat akan berada di bawah kontrol Turki, dan setelah Bendungan Illisu, yang merupakan bendungan terbesar dalam proyek GAP di Sungai Tigris, selesai dibangun, aliran Sungai Tigris diperkirakan akan berkurang sebesar 47% (Al-Ansari & Adamo, 2018). Turki memang merupakan aktor yang sangat dominan dalam pengelolaan Sungai Tigris dibandingkan dengan negara-negara hilir. Namun, Turki bukanlah satusatunya negara di dunia yang memiliki posisi dominan dalam pengelolaan

sungai lintas batas. Perbedaan terletak pada tingkat institusionalisasi kerja sama regional. Di Mekong, meskipun China dominan, terdapat mekanisme koordinasi regional yang relatif lebih mapan. Di sisi lain, di Sungai Tigris–Eufrat, institusi regional yang lemah, ketegangan geopolitik Timur Tengah, dan ketidakhadiran perjanjian komprehensif membuat ketidakseimbangan kekuatan menjadi lebih akut dan kurang diredam secara institusional.



Gambar 1. Llisu Dam on The Tigris River

Sumber: Turkish Dam (savethetigris.org)

Bendungan Ilisu adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang dibangun oleh pemerintah Turki sebagai bagian dari GAP untuk memanfaatkan potensi sumber daya air di area Tenggara Anatolia. Bendungan ini terletak di aliran Sungai Tigris, sekitar 65 km sebelum perbatasan Turki dengan Suriah, dan dirancang terutama sebagai fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang signifikan, serta mendukung kegiatan irigasi dan pengembangan wilayah. Pembangunan Ilisu memicu perdebatan yang sangat aktif baik di dalam negeri maupun secara internasional, terutama mengenai pengaruhnya terhadap aliran air ke negara-negara hilir seperti Irak, dampaknya terhadap lingkungan, serta

peninggalan budaya, termasuk kekhawatiran akan terendahnya situs bersejarah seperti kota kuno Hasankeyf. Diskusi akademis sering kali membahas Ilisu dalam konteks politik air dan keamanan air, yang menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya memiliki efek teknis, tetapi juga dampak politik dan sosial di kawasan Mesopotamia yang berbagi sumber daya air lintas negara (Warner, 2008). Dalam situasi Bendungan Ilisu, ketidaksetaraan ini memberi izin kepada Turki untuk membangun dan mengelola bendungan tersebut secara sepihak tanpa adanya perjanjian pembagian air yang mengikat secara hukum dengan Irak dan Suriah. Ketika negara-negara hilir tidak memiliki kemampuan ekonomi, politik, atau militer yang sebanding, peluang untuk bernegosiasi menjadi sangat minim, dalam keadaan ketidakseimbangan kekuatan yang tinggi, negara-negara hilir sering kali hanya dapat melakukan protes secara diplomatik tanpa memiliki pengaruh yang nyata untuk memengaruhi kebijakan negara hulu.

Ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan air Sungai Tigris semakin diperburuk oleh kurangnya perjanjian regional yang mengatur distribusi air secara resmi. Analisis mengenai situasi lintas batas antara Turki, Suriah, dan Irak menunjukkan bahwa usaha untuk menciptakan perjanjian pembagian air yang seimbang selalu menemui kegagalan. Hal ini disebabkan terutama oleh struktur internasional yang cenderung tanpa aturan, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mendorong kolaborasi, serta dominasi kepentingan nasional yang mendorong setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya yang mereka miliki. Dalam kondisi seperti ini, negaranegara yang berbatasan dengan sungai lebih memilih kebijakan satu pihak demi memastikan kebutuhan nasional mereka. Ketergantungan Irak dan Suriah terhadap Turki terkait dengan Sungai Tigris bersifat geografis serta struktural. Sebagai negara hulu, Turki secara fisik memiliki kendali atas sumber dan aliran awal Sungai Tigris sebelum airnya mengalir ke Irak dan Suriah. Posisi geografis ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai keuntungan struktural, yaitu keuntungan alami yang memberikan penguasaan atas aliran air lintas batas, negara hulu mempunyai kemampuan untuk mengatur, menahan, atau mengalihkan air sebelum memasuki negara hilir, yang mengakibatkan ketergantungan satu arah yang sulit untuk diimbangi oleh negara

hilir (Zeitoun & Warner, 2006). Selain aspek geografis, ketergantungan Irak pada Turki juga memiliki aspek ekonomi yang sangat penting. Irak adalah salah satu tujuan utama ekspor Turki di wilayah Timur Tengah, dengan beragam barang seperti bahan bangunan, makanan, dan barang konsumsi yang dikirim dari Turki ke Irak, hubungan semacam ini dapat dianggap tidak seimbang ketika satu pihak lebih bergantung daripada pihak lainnya. ketergantungan yang tidak seimbang ini menyebabkan adanya perbedaan kekuatan tawar karena pihak yang lebih tergantung akan lebih berhati-hati dalam menerapkan tekanan politik atau ekonomi pada mitra yang lebih dominan (Keohane & Martin, 1995).

Interaksi antara Turki, Irak, dan Suriah berlangsung tanpa adanya lembaga regional yang secara resmi mengikat. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki organisasi pengelolaan aliran sungai seperti MRC, sistem Tigris–Euphrates tidak memiliki institusi bersama yang permanen, mekanisme pemantauan, kewajiban berbagi data, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Keadaan ini menciptakan apa yang dalam kajian pengelolaan air dikenal sebagai kekosongan institusi, yaitu situasi di mana tidak ada aturan kolektif yang dapat membatasi tindakan sepihak dari negara-negara hulu. (Kibaroglu, 2012) menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme kelembagaan memperluas kebebasan negara hulu dalam menentukan kebijakan terkait air dengan cara sendiri. Situasi ini menjadi semakin rumit karena Turki tidak berpartisipasi dalam Liga Arab, sementara Irak dan Suriah terikat dalam organisasi tersebut. Ini berarti tidak ada forum regional yang mencakup ketiga negara untuk membahas isu pembagian sumber air secara bersama.

Lembaga semacam itu tidak ada, maka interaksi kembali bergantung pada distribusi kekuatan dan kemampuan negosiasi masing-masing negara. Ketiadaan organisasi pengelolaan aliran sungai membuat Irak dan Suriah kehilangan sarana hukum dan teknis untuk meminta transparansi data aliran air atau menjalankan manajemen bersama. Dalam kajian hydro-hegemony, kondisi ini disebut sebagai tidak adanya platform kelembagaan penyeimbang, yaitu kurangnya ruang institusi bagi negara hilir untuk menghadapi negara hulu. Tanpa adanya mekanisme regional, protes dari Irak dan Suriah hanya bersifat diplomatik dan tidak memiliki

konsekuensi institusional yang mengikat bagi Turki. Dalam situasi tanpa lembaga regional dan Turki yang tidak berada dalam struktur Liga Arab, interaksi antara Turki, Irak, dan Suriah terjadi dalam kondisi anarchic yang memperbesar ketidakseimbangan kapabilitas. Struktur ini menjelaskan mengapa meskipun ketiga negara berdaulat secara hukum, distribusi kekuasaan tetap tidak merata dalam praktiknya karena tidak ada institusi kolektif untuk menciptakan aturan bersama, mengawasi pelaksanaan, dan menegakkan kepatuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Hingga saat ini, Sungai Tigris belum memiliki institusi kerja sama formal yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya air antara Turki dan Irak. Padahal, kedua negara telah beberapa kali melakukan perundingan, seperti melalui *Joint Technical Committee* (JTC) sejak 1980, berbagai *memorandum of understanding* (MoU), serta pertemuan bilateral mengenai isu air. Namun, seluruh upaya tersebut masih bersifat teknis dan belum berkembang menjadi sebuah lembaga permanen yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, pembagian air, maupun penyelesaian sengketa seperti Mekong River Commission (MRC) pada Sungai Mekong.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas interaksi yang telah dilakukan dengan belum terbentuknya institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: faktor politik dan hubungan antarnegara apa yang telah mempengaruhi ketiadaan institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dinamika hubungan antarnegara antara Turki dan Irak dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Tigris.
2. Menganalisis faktor-faktor politik yang memengaruhi belum terbentuknya institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan kerja sama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya alam lintas batas terutama terkait bagaimana pertimbangan keuntungan relatif dan ketidakpastian memengaruhi keputusan negara-negara untuk tidak membentuk kerja sama formal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan peneliti dengan memberikan pemahaman mengenai pengaruh kepentingan nasional, ketimpangan kekuasaan, dan dinamika hubungan antarnegara terhadap pembentukan kerja sama dalam pengelolaan sungai tigris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dan sumber informasi penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Pengelolaan sumber daya air, (Meran et al., 2021) serta (Van Rijswijk et al., 2010) menyoroti pentingnya institusi dan kerja sama dalam pengelolaan air, terutama di daerah aliran sungai yang melintasi batas negara. Mereka menekankan bahwa air tidak hanya dianggap sebagai sumber daya alam, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan hukum yang memerlukan aturan yang jelas dan mekanisme koordinasi. Tanpa kerangka institusional yang kuat dan kerja sama lintas batas yang efektif, pengelolaan sumber daya air berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kesulitan dalam mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, keberadaan institusi bersama dan mekanisme koordinasi antara negara-negara merupakan faktor penting dalam memastikan distribusi dan pemanfaatan air yang adil dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Keohane & Martin, 1995) menekankan bahwa lembaga internasional hanya akan terbentuk jika negara-negara merasa bahwa lembaga- lembaga tersebut dapat menyediakan informasi yang transparan dan mengurangi biaya transaksi dalam kerja sama. Dalam kasus Sungai Tigris, ketidakmampuan Turki dan Irak untuk membentuk lembaga formal disebabkan oleh pandangan bahwa lembaga semacam itu sebenarnya akan membatasi otonomi mereka tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi negara-negara hulu. Hal ini diperkuat oleh pembedaan (Stein, 1982) antara dilema koordinasi dan kolaborasi. Menurut Stein, masalah air di Sungai Tigris merupakan masalah kolaborasi yang dipenuhi dengan godaan untuk curang demi kepentingan nasional, sehingga sulit mencapai kesepakatan stabil tanpa kekuatan paksa atau insentif yang signifikan.

Berbeda dengan model Komisi Sungai Mekong, yang berhasil menciptakan rezim kolaboratif berkat kepentingan bersama dalam pengembangan ekonomi.

Pengelolaan sungai lintas batas seringkali menjadi isu penting dalam hubungan internasional karena melibatkan kepentingan beberapa negara dalam sumber daya air yang sama. (Keohane, 1984) menjelaskan bahwa kerja sama antar negara masih dapat terbentuk meskipun sistem internasional bersifat anarkis dan tidak memiliki otoritas pusat. Melalui mekanisme timbal balik, negara-negara dapat menyesuaikan perilaku mereka terhadap negara lain, sehingga manfaat mutual dapat tercipta meskipun terdapat perbedaan kepentingan. Selain itu, keberadaan rezim dan lembaga internasional juga berperan dalam memperkuat kerja sama dengan menyediakan aturan, norma, dan mekanisme yang mendorong kepatuhan serta mengurangi potensi konflik antar negara. Pierre (Pierre et al., 2024) juga menekankan bahwa kerja sama internasional merupakan mekanisme penting dalam menangani berbagai isu lintas batas, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan lebih dari satu negara. Kerja sama ini melibatkan berbagai aktor seperti negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara yang berkoordinasi melalui diplomasi dan mekanisme multilateral untuk mencapai kepentingan bersama.

Pengelolaan sungai lintas batas juga menjadi perhatian dalam berbagai studi tentang sumber daya air di Timur Tengah. (A. Kibaroglu & Scheumann, 2013) menjelaskan bahwa Sungai Eufrat–Tigris merupakan sumber daya air yang penting bagi Turki dan Irak, penggunaannya sering menimbulkan ketegangan akibat perbedaan kepentingan dalam penggunaan air untuk irigasi, energi, dan kebutuhan domestik. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya air di wilayah tersebut mengalir melintasi batas negara, sehingga pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu negara saja. Selain itu, Kibaroglu juga menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi air sebagai mekanisme untuk mendorong kerja

sama antar negara melalui negosiasi, pembentukan lembaga bersama, dan perjanjian pengelolaan air lintas batas guna mencegah konflik dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Penelitian yang dilakukan oleh (Daoudy, 2007) menyoroti bagaimana dinamika hegemonik air, atau dominasi kekuatan air oleh Turki sebagai negara hulu, telah menghambat pembentukan lembaga kerja sama formal di wilayah sungai Tigris-Eufrat, yang bertolak belakang dengan stabilitas institusional di Sungai Mekong. Daoudy menjelaskan bahwa air di wilayah ini telah diamankan secara politik, di mana kepentingan nasional dan kedaulatan negara sering kali diutamakan di atas kepentingan pengelolaan bersama. Pandangan ini diperkuat oleh analisis (Smith & Winterman, 2022) yang menekankan bahwa hambatan utama dalam pembentukan lembaga formal di lembah Tigris bukanlah kendala teknis semata, melainkan keamanan lingkungan yang rapuh dan konflik berkepanjangan di Irak yang telah menciptakan krisis kepercayaan di antara negara-negara yang berbatasan dengan sungai. Tanpa pergeseran paradigma dari persaingan hegemonik ke tata kelola kolaboratif, model Komisi Sungai Mekong akan sangat sulit untuk direplikasi di wilayah Tigris karena negara-negara yang terlibat masih memandang air sebagai alat kekuasaan politik rather than sumber daya komunal yang harus dikelola melalui perjanjian hukum yang mengikat.

Terakhir, (Sağsen, 2006) menyoroti bahwa kegagalan dalam mendirikan lembaga formal di Sungai Tigris disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam mendefinisikan status hukum sungai tersebut, dengan Turki menganggapnya sebagai perairan lintas batas sementara Irak menuntut status sungai internasional. Sağsen (2006) berargumen bahwa berbeda dengan model Komisi Sungai Mekong, yang didorong oleh semangat kerja sama regional pasca-konflik, interaksi di Sungai Tigris justru terjebak dalam pendekatan sekuritisasi yang memandang air sebagai kedaulatan mutlak negara. Situasi ini diperparah oleh ketidakhadiran otoritas

supranasional atau pihak ketiga yang kuat untuk menjembatani kepentingan domestik masing-masing negara. Akibatnya, kerja sama hingga saat ini bersifat teknis dan ad hoc, bukan lembaga formal yang mengikat secara hukum, karena kekhawatiran dari hulu (Turki) bahwa lembaga semacam itu akan membatasi proyek pengembangan nasional mereka.

Studi-studi tersebut umumnya mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kerja sama, seperti perbedaan kepentingan nasional, rendahnya tingkat kepercayaan, dan dinamika politik antarnegara yang kompleks. Namun, penelitian semacam itu sering kali masih memandang ketiadaan kerja sama sebagai suatu kegagalan tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor politik dan hubungan antarnegara tersebut saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tidak adanya lembaga kerja sama formal. Selain itu, analisis mengenai bagaimana distribusi kekuasaan dan pertimbangan manfaat relatif memengaruhi keputusan negara-negara untuk tidak membentuk lembaga kerja sama masih relatif terbatas. Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor politik serta dinamika hubungan antara Turki dan Irak terutama yang berkaitan dengan dominasi negara hulu dan perhitungan manfaat relatif dalam menjelaskan tidak adanya lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

Untuk melihat perbandingan yang lebih jelas antara penelitian ini dengan sejumlah studi sebelumnya, dapat merujuk pada Tabel 1 yang menyajikan komparasi penelitian terdahulu secara sistematis, sebagai berikut:

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Metode	Teori/Konsep	Relevansi dengan Penelitian ini
Meran, Siehlow & Von Hirschhausen (2021)	Analisis ekonomi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air serta peran aturan dan institusi dalam distribusi air	Kualitatif Deskriptif	<i>Institutional economics, water governance, water pricing policy</i>	Pengelolaan air memerlukan lembaga dan peraturan yang kuat. Hal ini relevan untuk memahami mengapa, tanpa lembaga bersama seperti komisi sungai, pengelolaan Sungai Tigris sulit dikoordinasikan antara Turki dan Irak
Van Rijswijk, Gilissen & Van Kempen (2010)	Pentingnya kerja sama <i>transboundary</i> dalam pengelolaan sungai lintas negara dalam kerangka	Kualitatif	<i>Transboundary water governance, river basin management, Water Framework Directive</i>	Menyediakan kerangka analitis tentang bagaimana kerja sama sungai lintas batas seharusnya dibangun. Hal ini membantu menjelaskan perbedaan antara kesuksesan lembaga seperti Komisi
Keohane & Martin (1995)	Peran institusi dalam menyediakan informasi dan mengurangi	Kualitatif	<i>Liberal Institutionalism</i>	Menjelaskan bahwa lembaga-lembaga di wilayah Tigris gagal terbentuk akibat kurangnya

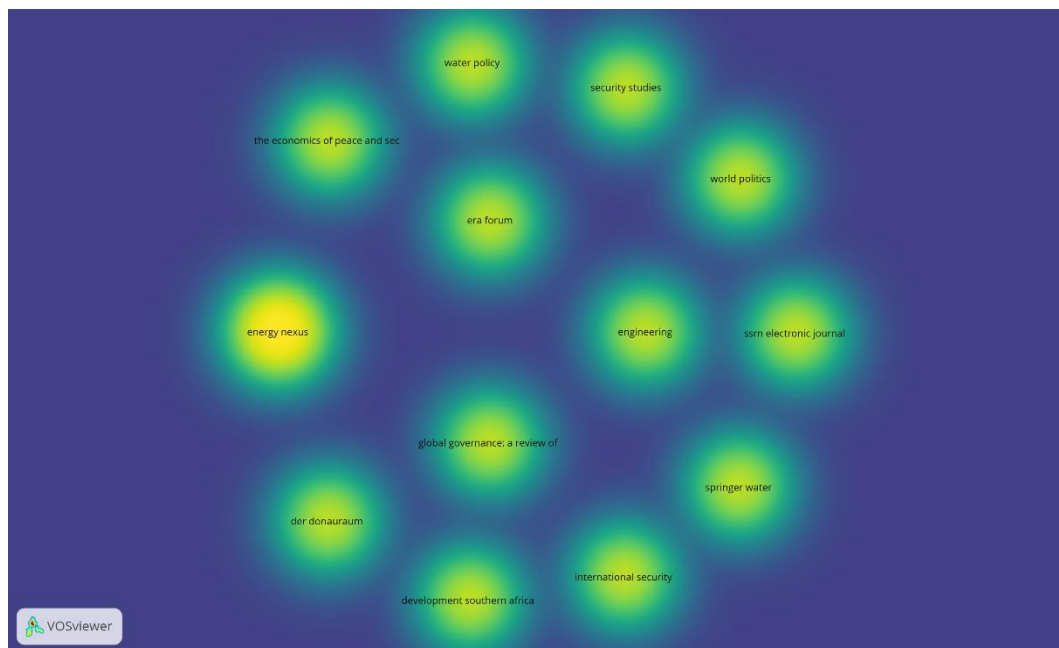
Peneliti	Fokus Penelitian	Metode	Teori/Konsep	Relevansi dengan Penelitian ini
	ketidakpastian.			insentif dan transparansi informasi antar negara.
Arthur A. Stein (1982)	Perbedaan antara rezim koordinasi dan kolaborasi dalam hubungan internasional.	Kualitatif	<i>Neoliberal Institutionalism</i>	Menunjukkan bahwa masalah Sungai Tigris merupakan konflik kepentingan yang bersifat zero-sum, yang membuat kerja sama formal sulit untuk diwujudkan.
Axelrod & Keohane (1984)	Menganalisis bagaimana kerja sama dapat terjadi dalam sistem internasional yang anarkis tanpa otoritas pusat.	Kualitatif	<i>Reciprocity, Prisoner's Dilemma, International Regimes</i>	Menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan atau menghambat kerja sama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya bersama seperti sungai internasional.
Charlius Pierre (2024)	Mengkaji konsep kerja sama internasional dalam hubungan internasional serta peran	Kualitatif	<i>International Cooperation, Global Governance, Peran organisasi internasional</i>	Pentingnya lembaga dan kerja sama multilateral dalam menangani isu-isu transnasional.

Peneliti	Fokus Penelitian	Metode	Teori/Konsep	Relevansi dengan Penelitian ini
	aktor dan organisasi global dalam menghadapi masalah global			
Marwa Daoudy (2007)	Dominasi Turki dalam negosiasi air di cekungan Tigris-Eufrat.	Kualitatif	<i>Hydro-hegemony & Kekuasaan Asimetris</i>	Menjelaskan peran dominan negara-negara hulu yang menghambat perjanjian formal.
Dané Smith & Kirsten Winterman (2022)	Pengaruh stabilitas regional terhadap pengelolaan sumber daya bersama.	Kualitatif	<i>Environmental Security</i>	Menunjukkan bahwa konflik internal di Irak menghambat penerapan model MRC.
İlhan Sağsen (2006)	Hambatan geopolitik dan hukum dalam kerja sama air di Cekungan Tigris-Eufrat.	Kualitatif	<i>Hydropolitics & Kedaulatan Negara</i>	Menjelaskan bahwa perbedaan dalam definisi hukum dan kepentingan nasional merupakan hambatan utama dalam pembentukan lembaga permanen bergaya Mekong.
Aysegül Kibaroglu (2013)	Pengelolaan dan diplomasi air di wilayah	Kualitatif	<i>Water Diplomacy, Transbounda</i>	Memberikan pemahaman tentang pentingnya

Peneliti	Fokus Penelitian	Metode	Teori/Konsep	Relevansi dengan Penelitian ini
	Sungai Efrat–Tigris yang melibatkan Turki dan Irak		<i>ry Water Governance</i>	diplomasi dan kerja sama antar negara dalam pengelolaan sungai lintas batas, khususnya Sungai Tigris.

Sumber: Dirangkum oleh peneliti melalui berbagai jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai acuan penelitian terdahulu

Peneliti memanfaatkan dua software, yaitu Publish or Perish untuk menghimpun data dan VOSviewer untuk melakukan analisis visual terhadap data yang diperoleh. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup istilah seperti *Tigris River*, *Turkey-Iraq water conflict*, *water security*, *hydro-hegemony*, *transboundary river*, *water policy*, dan *water cooperation*. Berdasarkan hasil pencarian data melalui Publish or Perish, ditemukan cukup banyak penelitian yang membahas konflik air lintas batas, keamanan air, maupun kebijakan pengelolaan sungai internasional secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas ketiadaan kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris dengan menggunakan perspektif *relative gains* dan *hydro-hegemony* masih relatif terbatas.



Gambar 2. Hasil pengolahan Data VOSviewer (*Density*)

Sumber: Dikelola oleh peneliti melalui *software VOSviewer*

Hasil analisis visual melalui VOSviewer juga memperlihatkan keterkaitan yang cukup kuat antara beberapa kata kunci seperti *water policy*, *security studies*, *world politics*, *energy nexus*, dan *global governance*. Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan Sungai Tigris tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan atau sumber daya air semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan nasional, keamanan regional, serta dinamika politik internasional. Selain itu, kemunculan istilah seperti *energy nexus* dan *water policy* menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya air memiliki hubungan langsung dengan kepentingan energi dan pembangunan domestik negara, khususnya dalam konteks kebijakan Turki melalui proyek GAP.

Visualisasi tersebut memperkuat argumentasi penelitian bahwa ketiadaan kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara hulu dan negara hilir. Dominasi Turki sebagai upstream state membuat pengelolaan Sungai Tigris lebih banyak

dikendalikan secara unilateral sehingga kerja sama permanen sulit tercapai. Dengan demikian, hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa isu Sungai Tigris memiliki keterkaitan kuat dengan studi keamanan, geopolitik, dan penguasaan sumber daya strategis yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

Penelitian ini menggunakan teori *Relative Gains* untuk menganalisis pengaruh politik dan hubungan antarnegara terhadap keputusan suatu negara untuk terlibat dalam atau menolak kerja sama internasional, khususnya dalam konteks keunggulan relatif. Selain itu, konsep *Cooperation Under Anarchy* digunakan untuk menjelaskan bagaimana sifat sistem internasional yang tidak teratur menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan antarnegara. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur politik dan hubungan antarnegara yang berkontribusi terhadap tidak adanya lembaga formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

2.2.1 Teori *Relative Gains*

Dalam studi ini, teori utama yang digunakan adalah Teori *Relative Gains*. Teori ini digunakan untuk mengkaji mengapa negara-negara enggan bekerja sama, bahkan ketika kerja sama tersebut diperlukan. Teori keuntungan relatif menekankan bahwa negara-negara tidak hanya mempertimbangkan apakah mereka akan memperoleh manfaat, tetapi juga membandingkan manfaat tersebut dengan manfaat yang diperoleh negara-negara lain. Jika ada kemungkinan bahwa negara lain akan memperoleh manfaat yang lebih besar, kerja sama mungkin akan ditolak. Dari sini, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menghalangi negara-negara untuk menjalin kerja sama tidak hanya terkait dengan kebutuhan bersama, tetapi juga berasal dari perhitungan kepentingan dan interaksi antar negara, yang cenderung kompetitif dan penuh kehati-hatian. Kondisi-kondisi ini menyebabkan negara-negara menjadi kurang percaya dan memilih untuk tidak terikat oleh lembaga kerja sama formal.

Hambatan utama bagi kerja sama dalam sistem internasional bukanlah sekadar anarki, melainkan peluang bagi negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan relatif mereka atas negara-negara lain. Struktur interaksi antarnegara memungkinkan suatu negara untuk mengubah keunggulan relatifnya saat ini menjadi keunggulan strategis di masa depan, negara tersebut cenderung bersikap hati-hati terhadap kerja sama, atau bahkan memilih untuk tidak bekerja sama sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, kerja sama menjadi sulit dicapai karena setiap negara khawatir bahwa pihak lain mungkin akan memanfaatkan keunggulan relatif tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri dan merugikan pihak lain. Ketidakhadiran otoritas pusat dalam sistem internasional memperkuat kecenderungan ini, karena tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa negara-negara tidak akan memanfaatkan keunggulan relatif mereka (Powell, 1991). Kerja sama dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, suatu negara mungkin tetap menolaknya jika ada peluang bagi pihak lain untuk memperoleh keunggulan relatif yang lebih besar. Dalam situasi tanpa lembaga kerja sama, Turki memiliki kesempatan untuk mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan relatif tersebut tanpa terikat oleh aturan distribusi yang membatasi; dengan demikian, ketiadaan lembaga justru menjadi kondisi yang menguntungkan bagi negara yang dominan. Sebaliknya, Irak, sebagai negara hilir, tidak memiliki kapasitas yang sama untuk memanfaatkan keunggulan relatif.

Menurut (Elman & Jensen, 2014), Dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara lebih memusatkan perhatian pada bagaimana manfaat didistribusikan daripada sekadar apakah mereka untung atau rugi. Jensen menjelaskan bahwa negara-negara akan ragu untuk bekerja sama jika kerja sama tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara-negara lain, karena hal ini dapat memengaruhi posisi kekuasaan mereka di masa depan. Ini berarti bahwa alasan utama negara-negara tidak membentuk perjanjian kerja sama adalah ketakutan akan kerugian relatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Interaksi antar negara yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian juga membuat negara-negara semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kerja sama, hal ini menunjukkan dalam hubungan antara Turki dan Irak terkait

pengelolaan Sungai Tigris, di mana negara yang lebih dominan cenderung enggan untuk terlibat dalam kerja sama karena takut kehilangan keunggulannya.

(Krasner, 1982) menjelaskan bahwa dalam sistem internasional, kerja sama sering kali terhambat oleh kepentingan nasional yang saling bertentangan dan kekhawatiran mengenai pembagian manfaat. Krasner menekankan bahwa meskipun lembaga-lembaga internasional dapat dibentuk, keberhasilan mereka sangat bergantung pada kesediaan negara-negara kuat untuk terlibat dan menahan diri. Dalam banyak kasus, negara-negara yang berada dalam posisi lebih dominan cenderung menghindari komitmen formal karena mereka tidak ingin kehilangan keleluasaan dalam mengendalikan sumber daya strategis. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah kerja sama akan terwujud atau tidak. Dalam konteks studi ini, alur pemikiran ini relevan untuk menjelaskan mengapa negara-negara seperti Turki cenderung tidak mendesak pembentukan lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris, mengingat kepentingan mereka dalam mempertahankan kendali dan keunggulan strategis. Powell (1991) menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, kekhawatiran mengenai manfaat relatif merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kerja sama. Powell berpendapat bahwa negara-negara cenderung menghindari kerja sama jika ada risiko bahwa pihak lain akan memperoleh manfaat yang lebih besar, karena hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di masa depan. Dengan demikian, bahkan dalam situasi di mana kerja sama dapat menghasilkan manfaat bersama, kekhawatiran mengenai pergeseran dalam distribusi kekuatan tetap menjadi hambatan utama. Dalam konteks studi ini, konsep ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Tigris belum dapat mencapai kesepakatan mengenai pembentukan lembaga bersama, karena kekhawatiran bahwa kerja sama akan memperkuat posisi beberapa pihak dan melemahkan pihak lainnya.

Ketiga tokoh ini membahas keuntungan relatif dalam kerangka neorealisme, namun dengan penekanan yang berbeda mengenai bagaimana keuntungan tersebut

memengaruhi kerja sama antarnegara. Jensen menyoroti bahwa negara-negara sangat peka terhadap kemungkinan kerugian relatif, sehingga cenderung menghindari kerja sama jika ada potensi bagi negara lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kranser menekankan bahwa kerja sama sering terhambat oleh konflik kepentingan negara dan kekhawatiran terkait pembagian keuntungan. Powell menekankan bahwa kekhawatiran tentang pergeseran keseimbangan kekuatan jangka panjang merupakan alasan utama negara-negara bersikap hati-hati dalam bekerja sama. Ketiganya menjelaskan bahwa kerja sama internasional dipengaruhi tidak hanya oleh manfaat bersama, tetapi juga oleh bagaimana manfaat tersebut didistribusikan dan dampaknya terhadap posisi kekuatan masing-masing negara dalam sistem internasional.

2.2.2 Konsep *Hydro-Hegemony*

Konsep hydro-hegemony dalam studi politik air lintas batas muncul untuk menjelaskan bagaimana hubungan kuasa membentuk pola pengelolaan sumber daya air antarnegara, terutama dalam situasi ketimpangan antara negara hulu dan hilir. Pendekatan ini menekankan bahwa kendali atas air tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara untuk mengerahkan kekuatan material, kelembagaan, dan politik guna mempertahankan dominasi dalam pengelolaan sungai lintas batas, sehingga memungkinkan negara yang dominan untuk mengatur distribusi air tanpa bergantung pada lembaga kerja sama formal. Hydro-hegemony menekankan bahwa dominasi tidak selalu bersifat paksa, tetapi juga dapat terjadi melalui mekanisme yang lebih halus seperti pengaruh kebijakan, pengendalian informasi, dan penetapan norma-norma yang menguntungkan negara yang dominan (Warner, 2008). Negara-negara dengan kapasitas yang lebih besar dapat menciptakan kondisi di mana negara-negara lain menerima ketidaksetaraan dalam distribusi air sebagai sesuatu yang sulit diubah, sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya lembaga-lembaga kerja

sama yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuatan tidak hanya membatasi negosiasi, tetapi juga membentuk struktur interaksi antarnegara dalam jangka Panjang.

Pada hubungan Turki-Irak, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana posisi Turki sebagai negara hulu memberikan keunggulan strategis dalam mengendalikan aliran Sungai Tigris melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan nasional yang terpusat. Situasi ini menciptakan hubungan yang asimetris, di mana Irak, sebagai negara hilir, memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap ketersediaan air, sehingga membatasi ruang geraknya dalam bernegosiasi. Dalam situasi seperti itu, pengelolaan air tidak terjadi melalui mekanisme yang setara, melainkan melalui struktur kekuasaan yang memungkinkan negara dominan mempertahankan kendali tanpa harus berkomitmen pada lembaga kerja sama formal. Hydro-hegemony juga menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu dijalankan melalui tekanan langsung, tetapi dapat terjadi melalui kebijakan sepihak yang secara konsisten menguntungkan negara yang dominan dan membatasi pilihan negara-negara lain (Cascão, 2009). Pada kasus Sungai Tigris, kondisi ini terlihat jelas dalam cara kebijakan pengelolaan air Turki terus berjalan tanpa adanya pengaturan kelembagaan yang mengikat dengan Irak, sehingga menciptakan pola interaksi asimetris dalam jangka panjang. Tidak adanya lembaga kerja sama tidak hanya mencerminkan koordinasi yang lemah, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur kekuasaan yang ada memungkinkan pengelolaan sungai terus berlanjut tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme kerja sama formal.

Konsep *hydro-hegemony* tidak hanya menjelaskan dominasi dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor politik dan dinamika hubungan antarnegara yang memengaruhi ketiadaan lembaga-lembaga kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris. Ketidakseimbangan kekuatan antara Turki sebagai negara hulu dan Irak sebagai negara hilir menciptakan struktur hubungan yang asimetris, di mana

faktor-faktor politik seperti kepentingan nasional, kendali atas sumber daya, dan orientasi kebijakan dalam negeri memainkan peran krusial dalam menentukan pola interaksi antarnegara. Dalam kondisi ini, hubungan antarnegara tidak berkembang menuju kerja sama institusional, melainkan cenderung mempertahankan pola unilateral yang menguntungkan negara dominan, akibat kurangnya insentif politik yang memadai untuk membentuk mekanisme bersama yang mengikat. Faktor-faktor hubungan politik seperti tingkat ketergantungan, keterbatasan kapasitas negosiasi, dan dinamika kepercayaan antarnegara semakin memperkuat kondisi di mana lembaga-lembaga kerja sama gagal terbentuk (Selby, 2003). Melalui konsep *hydro-hegemony*, tidak adanya lembaga kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik dan hubungan antarnegara yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga membatasi kemungkinan kerja sama formal dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.

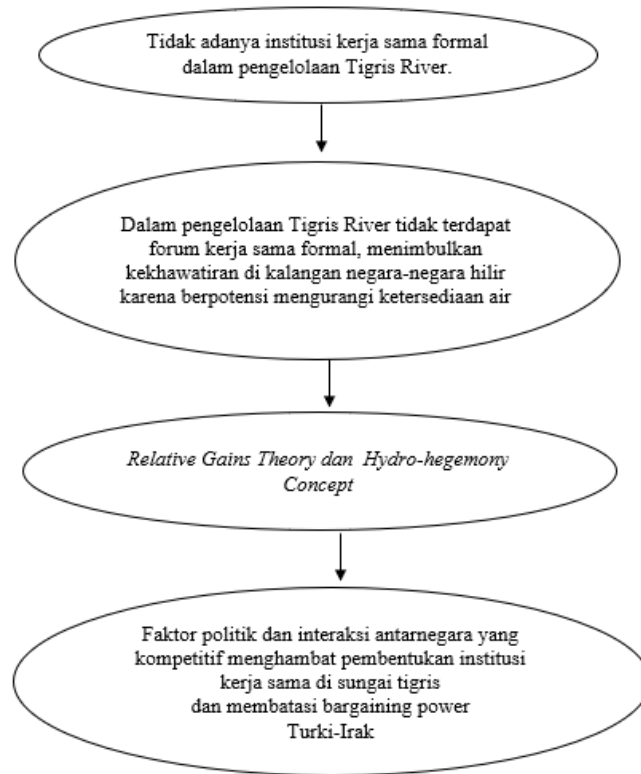
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual yang menggambarkan kondisi pengelolaan sumber daya air lintas batas di Timur Tengah, khususnya Sungai Tigris, yang mengalir melalui Turki dan Irak. Sungai ini merupakan sumber air utama yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, energi, dan kebutuhan rumah tangga di ketiga negara tersebut. Namun, karena sungai ini melintasi beberapa negara, pemanfaatannya sering kali menimbulkan konflik kepentingan, terutama terkait pembangunan bendungan, pengaturan aliran air, dan kebutuhan air masing-masing negara.

Konflik kepentingan ini kemudian memengaruhi dinamika hubungan di antara negara-negara yang berbagi sumber daya air Sungai Tigris. Di sisi lain, dalam beberapa kasus pengelolaan sungai lintas negara, negara-negara yang

berbagi sumber daya air telah mampu membentuk lembaga kerja sama formal untuk mengatur penggunaan air bersama, seperti Sungai Mekong melalui pembentukan Komisi Sungai Mekong sebagai forum koordinasi antarnegara dalam pengelolaan sungai. Situasinya berbeda untuk Sungai Tigris, di mana hingga saat ini Turki dan Irak belum mampu membentuk badan kerja sama formal serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan pembentukan badan kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris dibandingkan dengan model kerja sama yang telah terbentuk di Sungai Mekong.

Dapat dilihat dalam kerangka pemikiran dibawah, Penelitian ini menyoroti ketiadaan kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris yang menyebabkan kekhawatiran bagi Irak sebagai negara hilir akibat berkurangnya pasokan air. Posisi Turki sebagai negara hulu membuat Turki memiliki kontrol lebih besar terhadap aliran Sungai Tigris melalui pembangunan bendungan dan proyek pengelolaan air domestik. Penelitian ini menggunakan konsep *relative gains* untuk menjelaskan bahwa Turki tidak hanya mempertimbangkan keuntungan bersama, tetapi juga berupaya mempertahankan keuntungan strategisnya dibanding Irak. Selain itu, konsep *hydro-hegemony* digunakan untuk menjelaskan dominasi Turki sebagai negara hulu yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan distribusi air.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam dinamika pengelolaan Sungai Tigris, sebagai sungai yang melintasi beberapa negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya lembaga kerja sama formal antara Turki dan Irak dalam mengelola sungai tersebut. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, tetapi lebih pada pemahaman hubungan dan interaksi antar negara dalam upaya mengelola sumber daya air lintas batas. Menurut (Creswell, 2003) metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok pada suatu isu sosial atau politik. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika pengelolaan Sungai Tigris dan hambatan dalam membangun lembaga kerja sama formal antar negara.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis dan detail tentang kondisi pengelolaan Sungai Tigris dan hubungan antar negara yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Bryman, 2016), pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam tanpa memanipulasi variabel yang ada. Studi ini dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian mengenai mengapa Turki dan Irak belum mampu membentuk lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris, serupa dengan model kerja sama yang telah dibentuk di Sungai Mekong melalui Komisi Sungai Mekong. Selanjutnya, peneliti menentukan fokus

penelitian dan mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, dan publikasi akademis yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan rezim internasional untuk memahami bagaimana aturan, norma, dan kepentingan negara memengaruhi kemungkinan pembentukan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan dinamika hubungan antar negara dan faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis mengapa Turki dan Irak belum mampu membentuk lembaga kerja sama formal untuk pengelolaan Sungai Tigris, serupa dengan model kerja sama yang telah dibentuk untuk Sungai Mekong melalui MRC. Sungai Tigris adalah sungai lintas batas yang dimanfaatkan oleh ketiga negara tersebut untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, energi, dan kebutuhan domestik, sungai ini mengalir melalui beberapa negara, pengelolaannya membutuhkan koordinasi dan regulasi bersama untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Tidak seperti beberapa sungai lintas batas lainnya yang memiliki lembaga kerja sama formal, pengelolaan Sungai Tigris belum didukung oleh lembaga kerja sama terstruktur antara negara-negara yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada dinamika hubungan antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris, termasuk kepentingan nasional masing-masing, kebijakan pengelolaan sumber daya air, dan upaya yang dilakukan untuk mendorong kerja sama terkait pemanfaatan air. Penelitian ini tidak menekankan aspek teknis hidrologi, tetapi lebih pada dimensi hubungan internasional yang memengaruhi proses pembentukan, atau tidak terbentuknya, lembaga kerja sama formal untuk

pengelolaan sungai lintas batas ini. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris dibandingkan dengan model kerja sama yang telah dibangun di Sungai Mekong melalui Komisi Sungai Mekong.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sungai tigris oleh Turki dan Irak dalam konteks ketiadaan kerjasama. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup:

1. Laporan resmi dari organisasi internasional seperti *International Water Institute* (SIWI), *Food Agriculture and Organization Water of The United Nations* (FAO).
2. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas *Water Agreement* dan *Tigris River Basin*.
3. Artikel berita, laporan investigatif, serta dokumen kebijakan dari Lembaga pemerintah Turki dan Irak serta Lembaga internasional.
4. Buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa analisis konten atau (*content analysis*). Pendekatan ini pertama kali dikembangkan secara lebih terarah oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948, Lasswell memandang analisis konten sebagai metode untuk mengidentifikasi pola makna, pesan, dan kecenderungan komunikasi dalam berbagai bentuk teks. Menurut Lasswell, analisis konten dapat menjawab pertanyaan dasar komunikasi, seperti “*Who says what, to*

whom, why, how, and with what effect?” yang kemudian diaplikasikan untuk memahami hubungan antara pesan dan struktur sosial yang lebih luas (Lasswell, 1948). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten digunakan untuk menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (SIWI, FAO, UNESCO), artikel berita, serta dokumen kebijakan internasional yang berkaitan dengan isu sungai lintas batas dan kerjasama internasional.

Melalui teknik ini, peneliti menelusuri apa yang menjadi penyebab tidak adanya kerjasama terhadap pengelolaan sungai tigris. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema, simbol, dan pola representasi yang muncul dalam data, lalu mengaitkannya dengan teori *relative gains* sebagai landasan. Dengan demikian, analisis konten dalam penelitian ini tidak sekadar menghimpun informasi, tetapi juga bertujuan mengungkap makna sosial dan politik di balik penyebaran wacana tentang ketiadaan kerjasama internasional.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dirancang oleh (Miles et al., 2014). Model ini digunakan karena dapat menggambarkan proses analisis data dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan dalam penelitian kualitatif. Pada model ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling terkait, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

Pada tahap kondensasi data, peneliti akan mengumpulkan serta memilih informasi yang relevan tentang pengelolaan Sungai Tigris sebagai sungai internasional, terutama yang berhubungan dengan faktor politik dan hubungan antarnegara yang mempengaruhi belum terbangunnya lembaga kerja sama resmi. Data yang dikumpulkan meliputi aktor-aktor yang terlibat seperti Turki dan Irak, kebijakan pembangunan bendungan, variasi hubungan politik antara negara, serta isu-isu mengenai kepentingan nasional dan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti

perbedaan kepentingan, ketidakpercayaan antara negara, dan pertimbangan keuntungan relatif dalam kolaborasi. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah dikompresi disusun secara sistematis dalam narasi deskriptif untuk menunjukkan pola interaksi antarnegara dalam pengelolaan Sungai Tigris. Pada tahap ini, peneliti mulai menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, yakni *Relative Gains Theory* dan konsep kerja sama di bawah anarki, sehingga terlihat bagaimana faktor politik dan hubungan antarnegara mempengaruhi tidak adanya lembaga kerja sama formal. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan data sebagai respon terhadap pertanyaan penelitian. Peneliti akan menyimpulkan bagaimana interaksi politik dan hubungan antarnegara menjadi penghalang dalam pembentukan kerja sama formal, serta melakukan verifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kerja sama formal antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris tidak terjadi semata-mata karena persoalan teknis pengelolaan air, tetapi lebih dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan nasional dan ketimpangan kekuasaan antara kedua negara. Sungai Tigris memiliki posisi yang sangat penting bagi Turki maupun Irak, namun kedua negara memandang fungsi dan pengelolaan sungai tersebut dengan cara yang berbeda. Bagi Irak, Sungai Tigris merupakan sumber utama kehidupan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan air domestik, pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Sementara itu, bagi Turki, Sungai Tigris dipandang sebagai aset strategis yang dapat mendukung pembangunan nasional, ketahanan energi, pengembangan pertanian, serta memperkuat posisi geopolitik negara di kawasan Timur Tengah.

Ketergantungan Irak yang sangat tinggi terhadap aliran Sungai Tigris menyebabkan negara tersebut berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding Turki. Penurunan debit air akibat pembangunan bendungan di wilayah hulu memberikan dampak besar terhadap kondisi domestik Irak, mulai dari menurunnya produktivitas pertanian, meningkatnya kekeringan, degradasi lingkungan, hingga memburuknya kualitas air di berbagai wilayah negara. Krisis air yang terjadi juga memperbesar tekanan terhadap pemerintah Irak dalam menjaga stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan nasional. Kondisi tersebut membuat Irak secara konsisten mendorong pembentukan kerja sama pengelolaan air yang lebih adil dan terstruktur dengan Turki.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa Turki memiliki kecenderungan mempertahankan pendekatan unilateral dalam pengelolaan Sungai Tigris. Posisi geografis Turki sebagai negara hulu memberikan keuntungan strategis yang sangat besar dalam mengontrol aliran sungai sebelum memasuki wilayah Irak. Keuntungan tersebut dimanfaatkan Turki untuk mendukung proyek pembangunan domestik seperti *Southeastern Anatolia Project* (GAP), pembangunan bendungan, pembangkit listrik tenaga air, serta perluasan sistem irigasi pertanian di wilayah Anatolia Tenggara. Dalam perspektif Turki, penguasaan Sungai Tigris berkaitan langsung dengan kepentingan nasional negara sehingga pengelolaan air dipandang sebagai bagian dari hak kedaulatan negara yang tidak seharusnya diatur melalui mekanisme internasional yang mengikat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan Turki terhadap pembentukan water sharing agreement permanen didasarkan pada perhitungan rasional negara terhadap keuntungan dan kerugian yang dapat muncul dari kerja sama tersebut. Turki menilai bahwa mempertahankan kontrol penuh terhadap Sungai Tigris memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding berbagi kewenangan pengelolaan air dengan negara hilir. Melalui kontrol unilateral, Turki memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan air sesuai kebutuhan domestik, terutama untuk mendukung ketahanan energi, pembangunan ekonomi, dan stabilitas wilayah tenggara negara tersebut. Selain itu, Turki juga memandang bahwa keterikatan dalam perjanjian pembagian air permanen berpotensi mengurangi posisi strategis negara dalam hubungan regional. Sungai Tigris tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang dapat memperkuat posisi tawar Turki terhadap negara-negara hilir seperti Irak. Oleh karena itu, Turki lebih memilih mempertahankan kerja sama teknis terbatas dibanding membentuk lembaga kerja sama formal yang mengikat seperti *Mekong River Commission* (MRC).

Dalam perspektif *relative gains*, penelitian ini memperlihatkan bahwa Turki cenderung khawatir apabila kerja sama permanen justru akan memberikan keuntungan lebih besar bagi Irak sebagai negara hilir. Kekhawatiran tersebut

membuat Turki lebih memilih mempertahankan dominasi pengelolaan air dibanding membangun mekanisme kerja sama yang dapat membatasi kontrol negara terhadap sumber daya strategis. Dengan kata lain, Turki tidak hanya mempertimbangkan manfaat kerja sama secara bersama-sama, tetapi juga memperhatikan distribusi keuntungan yang diperoleh masing-masing negara.

Sementara itu, melalui perspektif *hydro-hegemony*, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan kekuasaan (*power asymmetry*) yang cukup besar antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris. Turki sebagai negara hulu memiliki kapasitas geografis, ekonomi, dan politik yang lebih kuat sehingga mampu mendominasi pengelolaan sumber daya air kawasan. Posisi tersebut menyebabkan Irak memiliki ruang yang lebih terbatas dalam memengaruhi kebijakan pengelolaan sungai. Ketimpangan kekuasaan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama sulitnya pembentukan kerja sama formal antara kedua negara.

Selain faktor kepentingan nasional dan ketimpangan kekuasaan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman perubahan iklim dan krisis air global semakin memperkuat kecenderungan negara untuk memprioritaskan kepentingan domestiknya masing-masing. Dalam situasi ketidakpastian lingkungan dan meningkatnya kebutuhan air di masa depan, negara-negara riparian cenderung mempertahankan kontrol terhadap sumber daya air strategis dibanding menyerahkan sebagian kewenangan melalui kerja sama internasional. Kondisi tersebut membuat peluang pembentukan lembaga kerja sama permanen dalam pengelolaan Sungai Tigris menjadi semakin sulit diwujudkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris dipengaruhi oleh kombinasi antara perbedaan kepentingan nasional, kalkulasi rasional negara, dan ketimpangan kekuasaan antara negara hulu dan hilir. Dalam kondisi tersebut, Turki sebagai negara yang memiliki posisi lebih dominan cenderung mempertahankan pendekatan unilateral demi menjaga keuntungan strategis nasionalnya, sedangkan

Irak terus berupaya mendorong kerja sama untuk menjaga stabilitas pasokan air dan keamanan nasional negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih realistis dan bertahap dalam membangun hubungan kerja sama pengelolaan Sungai Tigris antara Turki dan Irak. Mengingat perbedaan kepentingan nasional yang cukup besar antara kedua negara, pembentukan lembaga kerja sama formal yang bersifat permanen kemungkinan masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan pengelolaan Sungai Tigris tidak dapat hanya bergantung pada pembentukan lembaga bersama, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya masing-masing negara dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air di tingkat domestik

Selain itu, Irak juga perlu memperkuat kapasitas domestik dalam pengelolaan sumber daya air. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Sungai Tigris membuat Irak berada dalam posisi yang rentan ketika terjadi penurunan debit air dari wilayah hulu. Oleh karena itu, pemerintah Irak perlu meningkatkan efisiensi penggunaan air, memperbaiki sistem irigasi, mengurangi pemborosan air, serta mengembangkan teknologi pengelolaan air yang lebih modern agar tekanan terhadap sumber daya air dapat dikurangi.

Di sisi lain, Turki juga perlu mempertimbangkan dampak regional dari kebijakan pengelolaan air yang dilakukan secara unilateral. Stabilitas kawasan Timur Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, tetapi juga sangat berkaitan dengan stabilitas sumber daya air. Oleh karena itu, pengelolaan Sungai Tigris yang lebih kooperatif dapat membantu mengurangi potensi ketegangan regional dan memperkuat hubungan antarnegara riparian di masa depan. Penelitian ini juga menyarankan agar organisasi internasional maupun aktor regional berperan sebagai fasilitator dialog tanpa harus secara langsung

mencampuri kedaulatan pengelolaan air masing-masing negara. Pendekatan semacam ini dapat lebih diterima oleh Turki yang selama ini cenderung menolak internasionalisasi isu Sungai Tigris.

Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap dinamika politik air di kawasan Timur Tengah, termasuk bagaimana krisis lingkungan dapat memengaruhi pola hubungan antarnegara riparian di masa depan.

\

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Ankush, M. A., Ahmadifard, N., Kangarloei, B. A., & Miryaghoubzadeh, M. (2024). Assessment of the Water Quality Index for the Tigris River in Southeastern Iraq. *Mesopotamian Journal of Marine Sciences*, 39(1), 71–82. <https://doi.org/10.58629/mjms.v39i1.361>
- Al khatib, M. (2024). *Farmers in southern Iraq hit by water crisis—Action contre la Faim*. <https://www.actioncontrelafaim.org/en/news/headlines/farmers-in-southern-iraq-hit-by-water-crisis/>
- Alami et al. (n.d.). Retrieved May 18, 2026, from <https://www.kas.de/documents/282499/33078650/Scenarios+on+Water+Politics+in+the+Euphrates-Tigris+Basin+2040+-+Addressing+the+Water-Energy-Food-Ecosystem+%28WEFE%29+Nexus+through+Cooperation+among+Riparian+States.pdf/0a5fb23d-3c30-277c-c3c6-d0cc45d69620?version=1.0&t=1732203878166>
- Al-Ansari, N. (2016). Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins. *Engineering*, 8(3), 140–172. <https://doi.org/10.4236/eng.2016.83015>
- Al-Ansari, N., & Adamo, N. (2018). Present Water Crises in Iraq and Its Human and Environmental Implications. *Engineering*, 10(06), 305–319. <https://doi.org/10.4236/eng.2018.106021>
- Albert, J., Bernhardsson, M., & Kenna, R. (n.d.). *Transformations of Middle Eastern Natural Environments: Legacies and Lessons*.
- Al-Muqdadadi, S. W. H. (2025). The State Political Doctrine: A Structural Theory of Transboundary Water and Foreign Policy. *Water*, 17(13), 1901. <https://doi.org/10.3390/w17131901>
- Altinbilek, D., & Tortajada, C. (2012). The Atatürk Dam in the Context of the Southeastern Anatolia (GAP) Project. In C. Tortajada, D. Altinbilek, & A. K. Biswas (Eds.), *Impacts of Large Dams: A Global Assessment* (pp. 171–199). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23571-9_8
- Araz, S. (2026). Turkey's Water Politics and Its Ramifications for Riparian States. *Institute for Security and Analysis*. <https://securityandanalysis.net/turkeys-water-politics-and-its-ramifications-for-riparian-states/>
- A-Shakeri, H. (2026). *Iraq's water crisis: Dammed by neighbours, failed by leaders* |. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2025/08/iraqs-water-crisis-dammed-neighbours-failed-leaders>
- Ashly, J. (2025, January 24). *Iraq's Ancient Marshes Are Running Out of Time*. <https://jacobin.com/2025/01/iraqi-marshes-wetlands-drought>
- Azizi, M. A., & Leandro, J. (2025). Factors Affecting Transboundary Water Disputes: Nile, Indus, and Euphrates–Tigris River Basins. *Water*, 17(4), 525. <https://doi.org/10.3390/w17040525>
- Bachmann, J., & Csagoly, P. (2006). 15 years of Cooperation in Managing the Danube River Basin (1991–2006). *Der Donauraum*, 46(3–4), 250–266. <https://doi.org/10.7767/dnrm.2006.46.34.250>

- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- Cascão, A. E. (2009). *Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs. Cooperation?* 2(2).
- Chibani, A. (2023). Water Politics in the Tigris-Euphrates Basin. *Arab Center Washington DC*. <https://arabcenterdc.org/resource/water-politics-in-the-tigris-euphrates-basin/>
- Climate Diplomacy. (1960a, January 1). *EU Influence on the Euphrates-Tigris Conflict, Middle-East*. Climate-Diplomacy. <https://climate-diplomacy.org/case-studies/eu-influence-euphrates-tigris-conflict-middle-east>
- Climate Diplomacy. (1960b, January 1). *Turkey, Syria and Iraq: Conflict over the Euphrates-Tigris | Climate-Diplomacy*. <https://climate-diplomacy.org/case-studies/turkey-syria-and-iraq-conflict-over-euphrates-tigris>
- Collins, C. S., & Rhoads, R. A. (2010). The World Bank, support for universities, and asymmetrical power relations in international development. *Higher Education*, 59(2), 181–205. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9242-9>
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (2nd ed). Sage Publications.
- Daoudy, M. (2007). Benefit-sharing as a tool of conflict transformation: Applying the Inter-SEDE model to the Euphrates and Tigris river basins. *The Economics of Peace and Security Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15355/epsj.2.2.26>
- Dore, J., & Lebel, L. (2010). Deliberation and Scale in Mekong Region Water Governance. *Environmental Management*, 46(1), 60–80. <https://doi.org/10.1007/s00267-010-9527-x>
- Elithy. (2025). *Future Prospects of Resolution between Iraq and Türkiye on Water Sharing*. <https://www.globalpanorama.org/en/2025/11/future-prospects-of-resolution-between-iraq-and-turkiye-on-water-sharing/>
- Ellithy, A. (2025, November 21). *Future Prospects of Resolution between Iraq and Türkiye on Water Sharing—Amr Ellithy – Global Panorama*. <https://www.globalpanorama.org/en/2025/11/future-prospects-of-resolution-between-iraq-and-turkiye-on-water-sharing/>
- Elman, C., & Jensen, M. (Eds.). (2014). *Realism reader*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315858579>
- Elver, H. (2010). *Turkey's Rivers of Dispute—MERIP*. Middle East Research and Information Project. <https://www.merip.org/2010/03/turkeys-rivers-of-dispute/>
- epicmatthew. (2017, July 18). Drought in the Land between Two Rivers. *EPIC - Enabling Peace in Iraq Center*. <https://enablingpeace.org/iraq-water/>
- ESCWA. (2013). *INVENTORY OF SHARED WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA*.
- FAO. (2026). *Advocacy Note | Water Scarcity and Climate Risks in Iraq | UNESCO*. <https://www.unesco.org/en/articles/advocacy-note-water-scarcity-and-climate-risks-iraq>

- FAO (2008). Retrieved May 18, 2026, from <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ecd5b0d0-7e80-4b5f-90f8-0b8db75fad27/content>
- Gratien. (2014). Where the Tigris Flows: Water Security in Post-War Iraq and Turkey. *Save the Tigris Foundation*. <https://savethetigris.org/where-the-tigris-flows-water-security-in-post-war-iraq-and-turkey/>
- Grieco, J. M. (n.d.). *Anarchy And The Limits Of Cooperation: A Realist Critique Of The Newest Liberal Institutionalism*.
- Güleç, C., & Kibaroglu, A. (2026). A discourse analysis of bilateral water agreements between Türkiye and Iraq: Legal instruments of water diplomacy in the Euphrates-Tigris river basin. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 26(2), 327–343. <https://doi.org/10.1007/s10784-026-09712-5>
- İpek, C. D. (2025, December 2). *Euphrates-Tigris water dispute: New chapter in Türkiye-Iraq relations | Opinion*. Daily Sabah. <https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/euphrates-tigris-water-dispute-new-chapter-in-turkiye-iraq-relations>
- Jägerskog. (2012). *Feeding a thirsty world: Challenges and opportunities for a water and food secure future*. Stockholm International Water Institute.
- Karbowska, A. M. (2025). *Turkish Regional Rivalry in Syria: Challenges and Strategies Following the Fall of the Assad Regime*. <https://internationalrelations-publishing.org/articles/5-27>
- Kareem, N. (2023). The Land Between Two Rivers: Iraq's Water Crisis And Tensions With Turkey. *The Yale Review Of International Studies*. <https://yris.yira.org/middle-east/the-land-between-two-rivers-iraqs-water-crisis-and-tensions-with-turkey/>
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton Univ. Press.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 20(1), 39. <https://doi.org/10.2307/2539214>
- Kibaroglu, A. (2019). State-of-the-art review of transboundary water governance in the Euphrates–Tigris river basin. *International Journal of Water Resources Development*, 35(1), 4–29. <https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1408458>
- Kibaroglu, A., & Scheumann, W. (2013). Evolution of Transboundary Politics in the Euphrates-Tigris River System: New Perspectives and Political Challenges. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 19(2), 279–305. <https://doi.org/10.1163/19426720-01902008>
- Kibaroglu, D. A. (2020). *Water Diplomacy Frameworks In The Middle East And The Euphrates-Tigris River Basin*.
- Krasner, S. D. (1982). <http://www.jstor.org> Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185–205.
- Lasswell, H. D. (n.d.). *The structure and function of communication in society*.

- Lloyd, Gibson, & Owen. (2026). *Tigris-Euphrates river system*. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Tigris-Euphrates-river-system>
- Lucani, P. (2012). *Iraq agriculture sector note*. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/293345/>
- Lynch, H. (2025). ‘No water, no life’: Iraq’s Tigris River in danger of disappearing. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/environment/2025/dec/16/no-water-no-life-iraqs-tigris-river-in-danger-of-disappearing>
- Mahmoud, S. (2025). *Iraq and Turkey sign “historic” water management deal*. The National.
<https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/11/02/iraq-and-turkey-to-sign-new-deal-on-sharing-water/>
- Meran, G., Siehlow, M., & Von Hirschhausen, C. (2021). *The Economics of Water: Rules and Institutions*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-48485-9>
- Metwally, Yasser, & Ahmed. (2024). *Water For Food in Euphrates–Tigris River*. MDPI. <https://www.mdpi.com/2227-7099/12/5/107>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Montazeri, A., Mazaheri, M., Morid, S., & Mosaddeghi, M. R. (2023). Effects of upstream activities of Tigris-Euphrates River Basin on water and soil resources of Shatt al-Arab Border River. *Science of The Total Environment*, 858, 159751.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159751>
- Morgenthau. (2010). *Morgenthau, Law and Realism* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511780011>
- Nehemia, & Maike. (2021). *Ilisu Dam*. ArcGIS StoryMaps.
<https://storymaps.arcgis.com/stories/3fd0c163aa2a4a5886cb48631193b32f>
- Olson, & Speidel. (2024). *Tigris, Euphrates, and Shatt Al-Arab River System: Historic and Modern Attempts to Manage and Restore Iraq’s Lifeline*. Scientific Research.
<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=130595>
- Pfetsch, F. R. (2011). Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry. *Négociations*, 16(2), 39–56.
<https://doi.org/10.3917/neg.016.0039>
- Pierre, C., Edward, L., & Milner, H. (2024). *International Cooperation in International Relations*.
- Powell, R. (1991). Absolute and Relative Gains in International Relations Theory. *American Political Science Review*, 85(4), 1303–1320.
<https://doi.org/10.2307/1963947>
- Praveen. (2014, June 11). Dangerous waters—The world’s most controversial hydropower dam projects. *Power Technology*. <https://www.power-technology.com/features/featuredangerous-waters-the-worlds-most-controversial-hydropower-dam-projects-4290847/>
- Ratna, M. (2018). *Krisis Air Menghancurkan Irak Selatan*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/artikel/krisis-air-menghancurkan-irak-selatan>

- Republic of Turkiye. (n.d.). *Water: A source of conflict of coopeariton in the Middle East*.
- Rossi, C. (2019). Blood, Water, and the Indus Waters Treaty. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3510327>
- Rusyadi, A. R. D., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. (2022a). *Air Untuk Turki, Suriah, Dan Irak: Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Water Sharing Agreement Negaratepi Sungai Tigris Dan Efrat*.
- Rusyadi, A. R. D., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. (2022b). *AIR UNTUK TURKI, SURIAH, DAN IRAK: ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA WATER SHARING AGREEMENT NEGARATEPI SUNGAI TIGRIS DAN EFRAT*.
- Sadoon. (2026). *The Iraq-Turkey Water Agreement from the Perspective of International Relations Principles—Iraqi Group for Foreign Affairs*. <https://igfa.iq/en/1777>
- Saeed, F. H., Al-Khafaji, M. S., Al-Faraj, F. A. M., & Uzomah, V. (2024). Sustainable Adaptation Plan in Response to Climate Change and Population Growth in the Iraqi Part of Tigris River Basin. *Sustainability*, 16(7), 2676. <https://doi.org/10.3390/su16072676>
- Sağsen, İl. (2006). *A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University*.
- Sedighi, E., Golzar, H., Fath, B. D., Kharrazi, A., & Rovenskaya, E. (2025). Water-energy-food nexus in Tigris and Euphrates river basin through systemic lenses. *Energy Nexus*, 20, 100510. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2025.100510>
- Selby. (2003). *Water, Power and Politics in the Middle East*.
- Simavorian, A. (2024). *Turkey–Iraq. Will the Water Conflict Be Over?*
- Singh, A. (2025). *Turkey’s weaponisation of water: A geopolitical tool in the Tigris-Euphrates basin*. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/mindfly/turkeys-weaponisation-of-water-a-geopolitical-tool-in-the-tigris-euphrates-basin/>
- Smith, D., & Winterman, K. (2022). Models and Mandates in Transboundary Waters: Institutional Mechanisms in Water Diplomacy. *Water*, 14(17), 2662. <https://doi.org/10.3390/w14172662>
- Stein, A. A. (1982). Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World. *International Organization*, 36(2), 299–324.
- Stratfor. (2015). *Mesopotamian Vitality Falls to Turkey*. Stratfor. <https://worldview.stratfor.com/article/article/mesopotamian-vitality-falls-turkey>
- Tawfeeq, M., & Najim, A. (2025). *Grappling with its worst drought in a century, Iraq bets on a controversial oil-for-water deal* |. CNN. <https://edition.cnn.com/2025/12/21/climate/iraqs-oil-water-turkey-intl-latam>
- The Arab Weekly. (2025). *Turkey’s water policies leave Iraq parched and poised for unrest* |. AW. <http://the arabweekly.com/turkeys-water-policies-leave-iraq-parched-and-poised-unrest>

- Torabi Haghighi, A., Akbari, M., Noori, R., Danandeh Mehr, A., Gohari, A., Sönmez, M. E., Abou Zaki, N., Yilmaz, N., & Kløve, B. (2023). The impact of Turkey's water resources development on the flow regime of the Tigris River in Iraq. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 48, 101454. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101454>
- Transboundary River Basin Overview—Euphrates—Tigris*. (n.d.). Retrieved May 10, 2026, from <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b03dbb7a-00bb-44d6-8ed0-bf5667a98149/content>
- Travers, A. (2022). *New report urges immediate action to tackle water stress in Iraq's Euphrates-Tigris basin*. Rudaw. <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/210220222>
- Tsani, A. F. (2021). Turki Siap Bantu Pasokan Air Sungai Tigris untuk Irak. *Minanews.net*. <https://minanews.net/turki-siap-bantu-pasokan-air-sungai-tigris-untuk-irak/>
- Van Rijswick, M., Gilissen, H. K., & Van Kempen, J. (2010). The need for international and regional transboundary cooperation in European river basin management as a result of new approaches in EC water law. *ERA Forum*, 11(1), 129–157. <https://doi.org/10.1007/s12027-009-0145-0>
- Waldner. (n.d.). *Southeastern Anatolia Project*. Encyclopedia. Retrieved May 17, 2026, from <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/southeastern-anatolia-project>
- Warner, J. (2008). *Contested Hydrohegemony: Hydraulic Control and Security in Turkey*. 1(2).
- Wolf, A. T., Natharius, J. A., Danielson, J. J., Ward, B. S., & Pender, J. K. (1999). International River Basins of the World. *International Journal of Water Resources Development*, 15(4), 387–427. <https://doi.org/10.1080/07900629948682>
- Wolf, A. T., UNEP, FAO, & Oregon State University (Eds.). (2002). *Atlas of international freshwater agreements*. United Nations.
- WRDpaper*. (n.d.).
- Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). Hydro-hegemony – a framework for analysis of trans-boundary water conflicts. *Water Policy*, 8(5), 435–460. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>
- Zheng, W. (2026). Can Iraq-Turkey Deal Help Iraqi Water Security? AGSI. <https://agsi.org/analysis/can-iraq-turkey-deal-help-iraqi-water-security/>